

Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Deylia Carolina Bangun

Program Studi S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

deyliacarolina@yahoo.co.id

Dr. Agus Suprijono, M.Si.

Program Studi S-1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program yang dicanangkan oleh Pemerintah KEMENSOS dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, salah satunya dengan melalui Program Pendidikan dan Kesehatan. Rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) membawa dampak pada buruknya gizi, serta menyebabkan banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya di sekolah. Sebagian diantaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan. Semakin besarnya jumlah anak usia sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi terhadap negara. Kebanyakan dari mereka harus bekerja dari pagi hingga sore hari, mereka tidak memedulikan panas atau hujan yang terpenting bagi mereka adalah dapat membawa pulang uang untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Kebanyakan dari mereka adalah anak yang masih membutuhkan pendidikan, dan wajib untuk mengikuti program 9 tahun wajib belajar yang sudah dibuat oleh Pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan oleh KEMENSOS dapat meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar 9 Tahun khususnya bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan oleh KEMENSOS dapat meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar 9 Tahun khususnya bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, metode kualitatif adalah berusaha menggali, memahami, dan mencari fenomena sosial. Fokus studi penelitian ini adalah Peran dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan partisipasi wajib belajar 9 tahun khususnya bagi anak rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa program ini belum berjalan dengan baik, karena masih banyak ditemukan permasalahan yang belum diselesaikan secara baik sehingga program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Sooko belum terlaksana sesuai dengan harapan program ini. Jika di analisis menggunakan teori fungsionalisme struktural Meron yaitu tentang disfungsi, fungsi manifest, dan fungsi laten maka PKH adalah sebuah organisasi yang bekerja sesuai dengan sistem yang berlaku, dimana PKH dapat diartikan sebagai alat menyalurkan dana bantuan terutama di bidang pendidikan. Menurut merton sendiri fungsi didefinisikan sebagai fungsi "konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian sistem tertentu". Akan tetapi ada satu bias (simpangan) ideologi yang jelas ketika orang hanya berfokus pada adaptasi atau penyesuaian karena mereka merupakan konsekuensi negatif untuk fakta sosial. Penganut teori fungsional ini memang memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif.

Kata Kunci : PKH, Pendidikan, Wajib Belajar, RTSM

Abstract

The family of hope program (PKH) is an effort by the government KEMENSOS in reducing poverty issues in indonesia, one of them is through the education and health. Their low economic ability a family extremely poor households (RTSM) bring impact on bad nutrition, as well as result in lots of children not be able to continue classes at school. Which included among others must work hard help make money for his family and some forced to be street children. Greater the number of children age schools that do not able to obtain the education deserving to be worsening the condition social, economic, and political in the future and resulting in social problem very high evaluation the state. Most of them have to work from morning to afternoon, they do not concern the heat or rain most important for them is could have taken home money to

help the their families. Many of them are children who are still need education, and must to contribute to the schemes nine years compulsory already made by the government.

The purpose of this research is how the role of family of hope program formulated by KEMENSOS can increase the participation of compulsory nine years especially for children of very poor households (RTSM) in Sooko district Mojokerto areas.

Of the nature of this research are descriptive which is being undertaken to obtain clear image about how the role of family of hope program (PKH) which issued by KEMENSOS can increase the participation of compulsory nine years old especially for children of very poor households (RTSM) in Sooko district Mojokerto areas. While methods used in research is qualitative, the qualitative method is trying to dig, understand, and find social phenomena. Focus study research is the role of family of hope program (PKH) in improving the participation of compulsory nine years especially for the extremely poor households (RTSM).

The result of this research found that the program has not been going well, because there are still many found the problems not yet settled in good that the compulsory education program education of nine years in Sooko district not been undertaken in conformity with expectation this program. If analyzed use the theory of functionalism structural Meron which was about dysfunction, function manifest, and functions latent so PKH are an organization that work in accordance with a system prevailing, where PKH can be defined as an instrument channel funds assistance especially in the education sector. According to Merton own function is defined as a function “consequence observed made to the adaptation or adjustment particular system”. But there is one biased (byway) that ideology obvious when people only focusing on the adaptation or adjustment because they were negative consequences for social fact. An adherent of a theory functional this is indeed pranata looked all existing social in a particular society convenience functional in terms of negative and positive.

Keywords: PKH, Education, Compulsory Education, RTSM

PENDAHULUAN

Seperti yang rutin terjadi pada pergantian Tahun Ajaran Baru, pada saat itu dunia persekolahan disibukkan oleh gelombang Penerimaan Siswa Baru (PSB). Pihak sekolah, orangtua siswa, dan siswa atau calon siswa yang akan memasuki atau melanjutkan sekolah, saat itu sedang sibuk dengan proses pendaftaran dan penerimaan siswa baru. Mencermati proses pendaftaran dan penerimaan siswa baru, masalah klasik dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mengemuka lagi-lagi adalah mahal biaya pendidikan. Masalah pendidikan yang di hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah untuk menangani masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Peran orang tua menjadi peran utama dalam pendidikan anak-anak di Indonesia, tetapi kenyataan masih banyak orang tua di yang belum sepenuhnya mendukung pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan kondisi seperti ini, orang tua tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, karena mereka tentu mempunyai alasan tersendiri dalam hal ini. Pelaksanaan wajib belajar selain menjadi hak dan kewajiban orang tua, juga menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaannya. Dan tak kalah pentingnya pelaksanaan wajib belajar menjadi

hak dan kewajiban pemerintah. Demikian halnya peserta didik juga memiliki hak untuk mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikan mereka.

Rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) membawa dampak pada buruknya nutrisi dan gizi,serta menyebabkan banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya dibangku sekolah. Sebagian diantaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan. Semakin besarnya jumlah anak usia sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi terhadap negara. Dalam penanganan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia ini kemungkinan akan semakin sulit diatasi. Hal ini disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan serta rendahnya pendapatan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Selain itu mahal biaya pendidikan menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit untuk mengenyam dunia pendidikan yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia, maka hal ini juga diperlukan tentang adanya pemberdayaan dari keluarga.

Secara prinsip program ini sangat layak dan patut untuk dilakukan oleh pemerintah. Namun permasalahan anak-anak di Indonesia bukan hanya dari segi ekonomi saja, masih banyak seperti halnya masalah gizi dan jaminan kesehatan bagi tumbuh kembang seorang anak dari keluarga sangat miskin di Indonesia ini. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan. Untuk jangka pendek, melalui pemberian bantuan uang tunai terhadap RTSM, program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan untuk jangka panjang, melalui kewajiban yang ditentukan, diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku terhadap perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan anak-anak RTSM tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasar obyek penelitian, baik tempat maupun sumber data, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang mengungkapkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Makna yang terkandung dalam pendekatan kualitatif ini ditunjukkan melalui implementasi di lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap suatu gejala, baik pengamatan langsung melalui informasi maupun dengan mempelajari data-data untuk dapat menjawab pertanyaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek yang diteliti. Metode kualitatif adalah berusaha menggali, memahami, dan mencari fenomena sosial yang kemudian menghasilkan data yang mendalam. gambaran yang mendalam mengenai peran PKH dalam meningkatkan partisipasi wajib belajar 9 tahun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan struktur fungsional yaitu pendekatan yang menganalisis sistem sosial secara makro. Pendekatan ini memandang masyarakat adalah sebuah sistem yang teratur dan bersifat stabil, pendekatan ini juga memandang masyarakat sebagai sistem kompleks yang bagian-bagian didalamnya bekerja secara bersama guna menghasilkan solidaritas dan stabilitas. Sistem yang stabil ini dicirikan oleh masyarakat dimana mayoritas anggota atau para individu memiliki perangkat nilai, kepercayaan, dan perilaku yang digunakan secara bersama. Pendekatan ini juga memandang masyarakat terdiri atas bagian yang menjalankan fungsi yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan padu dan harmonis antar struktur dan

fungsi tersebut menyumbang pada stabilitas masyarakat. Pendekatan struktur fungsional ini berusaha untuk menguraikan ciri-ciri yang menjadi “duniannya” seperti apa tata cara yang terorganisasikan dan apa tidak. Data yang diperoleh bersifat deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau ungkapan dimana data tersebut dari observasi dan hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sooko

Untuk memaksimalkan program ini, KEMENSOS telah menunjuk pendamping sebagai pengawal program, dimana inilah yang akan mengontrol syarat yang menjadi kewajiban RTSM penerima bantuan. Di samping itu pendamping diharapkan mampu mengadvokasi pada kebutuhan RTSM terutama untuk mengakses pendidikan bagi siswa yang putus sekolah dan ingin melanjutkan kembali ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah memutus rantai kemiskinan dengan cara meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan taraf pendidikan bagi anak-anak RTSM. Oleh karena itu bantuan PKH ini persyaratannya antara lain harus memiliki anak usia pendidikan dasar 9 tahun, maka program ini diharapkan dapat bersinergi dengan program pemerintah lain yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dan yang tidak kalah penting adalah pemberian penyuluhan secara rutin bulanan kepada kelompok RTSM peserta PKH, dimana pada penyuluhan itu di titik beratkan pada usaha merubah perilaku dan pola pikir para RTSM peserta PKH. Seperti yang telah kita ketahui pola pikir RTSM adalah sangat konsumtif, sehingga bantuan yang seharusnya digunakan untuk SDM anak justru dihabiskan untuk kebutuhan sendiri, hal ini butuh bimbingan dan penyuluhan secara terus menerus sehingga para RTSM peserta PKH mengerti mana yang menjadi kebutuhan pokok (primer) dan mana yang hanya kebutuhan tambahan (skunder) baik bagi anaknya maupun bagi dirinya sendiri.

2. Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin Peserta PKH di Kecamatan Sooko

Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) peserta PKH di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto tiap tahun selalu menurun, hal ini disebabkan oleh habisnya persyaratan yang dimiliki oleh peserta PKH yang bersangkutan. Misalnya, RTSM ini hanya memiliki seorang anak yang sudah duduk di bangku kelas 9 SLTP/MTs, maka ketika ia lulus sedang RTSM itu tidak

hamil lagi maka dia akan di *exit* dari peserta PKH karena dia dianggap tidak bersyarat lagi.

3. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun di Kecamatan Sooko sudah relative baik. Hal ini, kata staf UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sooko sebagai pengawas. Untuk mencapai target pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Sooko ini, di SMP Negeri 1 Sooko Kabupaten Mojokerto ini sudah membuka kelas inklusi dimana kelas ini disediakan khusus untuk bagi anak usia SMP yang kemampuannya dibawah standar rata-rata anak, adapun yang setingkat SD ada di SDN Japan disamping juga ada SLB/SMPLB. Adapun anak yang dulunya drop out sebelum lulus SD/MI atau SMP/MTs di Sooko banyak dibuka kejar paket A maupun B.

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang telah dilakukan oleh pendamping PKH. Para pendamping sudah menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun, masih banyak kekurangan dari kinerja mereka selama ini. Dari data dan hasil lapangan saya peroleh masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan bantuan sosial berupa dana PKH ini, terutama warga yang menerima dana bantuan PKH ini. Sebagai mana yang telah dijelaskan pada paparan data di atas yang berupa beberapa peran pendamping PKH di lapangan dan hal-hal yang telah dilakukan. Jika hal tersebut di analisis dengan teori Fungsionalisme Struktural Merton, Yaitu tentang disfungsi, fungsi manifest, dan fungsi laten. Dalam hal ini, fungsi manifest adalah fungsi yang dikehendaki. Fungsional struktural berfokus pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Dia mengatakan bahwa setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsional structural harus menggambarkan suatu item yang distandarkan (yakni terpola dan berulang).

PKH adalah sebuah organisasi yang bekerja sesuai dengan sistem yang berlaku, dimana PKH dapat diartikan sebagai alat menyalurkan dana bantuan kepada RTSM terutama di bidang pendidikan. Menurut merton sendiri fungsi didefinisikan sebagai "konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu". Akan tetapi ada satu bias (simpangan) ideologi yang jelas ketika orang hanya berfokus pada adaptasi atau penyesuaian karena mereka merupakan konsekuensi negatif untuk fakta sosial. Penganut teori fungsional ini memang memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif. Pokok pikiran Robert Merton yang kedua, yakni menjelaskan suatu institusi secara

umum tidak harus selalu berfungsi atau tidak berfungsi tetapi berfungsi untuk kelompok orang tertentu dan tidak berfungsi untuk kelompok orang yang lain, merupakan pergeseran dari fungsionalisme yang secara implisit menyetujui adanya status-quo. Seperti halnya dengan pemikiran Merton tentang disfungsi, Program PKH ini merupakan sistem dimana sistem ini mungkin berfungsi untuk kelompok yang satu seperti penerima bantuaun PKH atau RTSM, tetapi program ini belum tentu berfungsi untuk kelompok yang lain seperti halnya orang yang seharusnya menerima bantuan sesuai dengan sistem yang berlaku.

Program PKH ini bisa dikatakan berfungsi bagi para RTSM, namun demikian seperti yang dijelaskan Merton bahwa Program ini dapat diperhitungkan karena program tersebut berjalan dengan jangka panjang yaitu dari balita hingga program wajib belajar 9 tahun terpenuhi. Tetapi pada kenyataannya program ini masih belum bisa memperbaiki kesalahan yang sudah ada, sistem ini berjalan tapi tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah lebih khususnya pada masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas tentang Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi anak rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sejauh ini masih belum berjalan secara efektif terutama dalam meningkatkan partisipasi wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sooko. Kinerja dari para pendamping pun dinilai masih sangat kurang dalam menangani beberapa persoalan yang ada di lingkungan anggota RTSM. Jika saja Program ini dapat dijalankan dengan baik tentunya akan sangat menguntungkan bagi anak RTSM dan juga bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan terutama dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rokhoul Alamin.2010.*Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Departemen Sosial RI.2009.*PEDOMAN UMUM PKH 2009*. Jakarta: Tim Penyusun Pedoman Umum PKH Lintas Kementrian dan Lembaga
- Eka Prastia Pradikta.2013. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Desa*
- Ritzer, George, et all.2009. *Teori sosiologi Modern* . Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana. Hal 235
- Raho, Bernard.2007.

Ritzer, George, 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Zamroni. 1992. *Pegantar Perkembangan Teori Sosial*. PT Tiara Wacana: Yogyakarta

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 14,97, dan 186

Tim Penyusun Pedoman Umum PKH.2007.*Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*.Jakarta

Tim Penyusun Pedoman Umum PKH 2007.*Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan*.Jakarta

Situs Internet:

<http://anthonie.multiply.com/jurnal/item/387/PKH>

<http://www.bps.go.id/?news=696>

<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod>

<http://jutaan-pengunjung.blogspot.com/2010/03/tipe-macam-pengertian-PKH>

<http://www.tnp2k.go.id/userfiles/image/BSM/202014/Tabel-jumlah-Penerima-dana-bantuan-Pkh>

<https://nurhidayati494.wordpress.com/2014/03/01/teori-robert-k-merton/comment-page-1>

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster/program-keluarga-harapan-pkh>

<http://www.pkh-dinsosjatim.info>

www.bappennas.go.id/get-file0server

